

ANALISIS ISU DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER KABUPATEN BANJARNEGARA

Oleh : Sofa Marwah ¹

Abstrak :

Indeks pembangunan manusia dan gender di daerah masih menunjukkan disparitas dengan capaian nasional dan provinsi. Dalam hal ini HDI dan GDI Kabupaten Banjarnegara masih di bawah HDI dan GDI Provinsi Jawa Tengah, bahkan nomor tiga terendah di Jawa Tengah. Selain itu, disparitas antara HDI dan GDI di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan hasil pembangunan belum dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan secara adil dan merata. Persoalan pembangunan gender di Banjarnegara tercermin dari belum maksimalnya angka partisipasi anak usia sekolah laki-laki dan perempuan, angka kematian ibu yang cukup tinggi, rendahnya penyerapan perempuan pencari kerja dalam dunia kerja, kekerasan terhadap perempuan, rendahnya keterwakilan politik perempuan, dan sebagainya. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Pemkab Banjarnegara telah melahirkan kebijakan strategi pembangunan daerah responsif gender sebagai bentuk komitmen dan kerja keras pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan gender di daerah tersebut. Untuk itu komitmen dan upaya pemerintah daerah patut mendapatkan apresiasi bersama.

Kata kunci: *permasalahan gender, kebijakan, pembangunan gender*

A. Pendahuluan

Pembangunan memiliki hakikat menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menganggap manusia sebagai alat bagi pembangunan. Dalam hal ini, UNDP telah mengembangkan indikator pembangunan manusia yang berbasis komponen kualitas hidup melalui indikator *Human Development Index* (HDI). HDI dibangun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). ² Pada tingkat nasional, HDI meningkat selama 9 tahun terakhir, yaitu mulai Tahun 2004 HDI nasional yaitu 68,69 yang meningkat menjadi 73,29 pada Tahun 2012. ³

¹ Penulis adalah dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed, email sofamarwah75@gmail.com.

² Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir. Selanjutnya pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Adapun hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*). UNDP, *Human Development Report 1995* (New York: Oxford University Press, 1995).

³ *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2013*, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2013.

Meskipun demikian, peningkatan HDI nasional menunjukkan disparitas dengan capaian pembangunan gender di Indonesia. Data KPPA& BPS menunjukkan bahwa *Gender Devepoment Index (GDI)* selama 9 tahun terakhir berkisar dari 63,94 pada Tahun 2004 dan menjadi 68,52 pada Tahun 2012.⁴ *Gender Development Index (GDI)* merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesetaraan antara capaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian GDI adalah capaian HDI setelah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Adanya disparitas antara HDI dengan GDI menunjukkan adanya permasalahan serius yang terkait dengan kapabilitas perempuan dibanding kapabilitas laki-laki.

Selanjutnya *Gender Empowerment Measure (GEM)* merupakan ukuran persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan (peranan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, kepemimpinan, dan teknisi). Meskipun pada Tahun 2012 terjadi peningkatan capaian GEM yaitu 70,07 persen dari 69,14 pada Tahun 2011, namun capaian GEM untuk perempuan semua komponen GEM masih lebih rendah daripada laki-laki.⁵

Salah satu wilayah yang memiliki capaian HDI provinsi melebihi HDI nasional adalah Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2012 HDI Jawa Tengah adalah 73,36. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan tingkat Provinsi Jawa Tengah telah menghasilkan tiga komponen kualitas indeks pembangunan manusia yang melebihi kualitas pembangunan manusia nasional. Namun demikian, GDI Provinsi Jawa Tengah juga masih menunjukkan disparitas dengan capaian HDI provinsi. Pada tahun 2012 GDI adalah 66,80, sedangkan capaian GEM pada Tahun 2012 adalah 70,66.

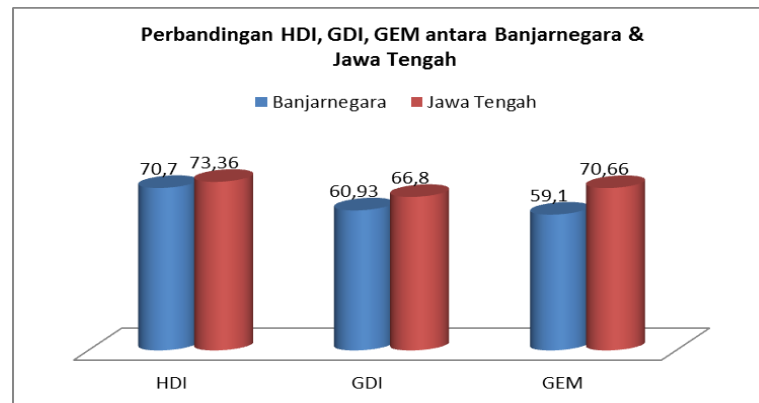
Adanya permasalahan kapabilitas antara laki-laki dan kapabilitas perempuan di Provinsi Jawa Tengah, antara lain tercermin dari permasalahan pembangunan gender yang cukup serius di Kabupaten Banjarnegara. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, HDI Kabupaten Banjarnegara menempati

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

peringkat ke-3 dari bawah. Adapun disparitas antara GDI Banjarnegara dengan GDI Jawa Tengah, maupun GEM Banjarnegara dan GEM Jawa Tengah juga terpaut cukup jauh. Perbandingan capaian HDI, GDI dan GEM antara Banjarnegara dan Jawa Tengah dirincikan sebagai berikut:

Diagram 1. Perbandingan HDI, GDI, GEM Banjarnegara dan Jateng



Sumber : KPPPA, 2013, diolah

Selanjutnya tulisan ini akan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara untuk mengikis disparitas antara capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender di daerahnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemkab Banjarnegara juga merupakan upaya pemkab untuk mengejar ketertinggalan pembangunan gender di Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kajian yang dilakukan lebih merujuk pada analisis pengembangan kebijakan pembangunan berperspektif gender di daerah dari aspek substansial dan membuat relevansinya dengan berbagai isu dan permasalahan gender dalam proses pembangunan gender setempat.

B. Identifikasi Isu dan Permasalahan Gender Kabupaten Banjarnegara

Penghitungan komponen HDI, GDI dan GEM adalah upaya mengidentifikasi hasil-hasil pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi sejauh mana dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Secara khusus, penghitungan GDI dan GEM adalah untuk menunjukkan apakah perempuan dan laki-laki dapat menikmati hasil-hasil pembangunan di bidang tersebut, termasuk sosial-politik, secara adil dan merata. Dengan demikian capaian GDI maupun GEM menunjukkan capaian prestasi keseluruhan

perempuan dalam pembangunan di sebuah daerah. Kesetaraan gender dalam pembangunan di suatu daerah memberi kontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan sosial di daerah tersebut.⁶ Dalam hal ini data BPS Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir berimbang dengan laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki adalah 450.374 jiwa dan penduduk perempuan adalah 448. 522 jiwa.⁷ Kenyataannya, meskipun jumlah penduduk perempuan hampir berimbang dengan laki-laki, namun perempuan dan laki-laki belum dapat menikmati hasil-hasil pembangunan daerah secara adil dan setara.

Permasalahan yang menonjol dalam bidang pendidikan adalah masalah angka putus sekolah yaitu sejumlah 4.391 siswa dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.⁸ Sayangnya data tersebut belum terpilah antara angka putus sekolah laki-laki dan perempuan. Namun sebagai gambaran adanya kesenjangan gender, rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun adalah 0,97 pada Tahun 2011. Selain itu, tingkat partisipasi sekolah bagi anak usia sekolah juga belum maksimal, meskipun belum ada data secara detail mengenai angka partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan. Secara rinci Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Banjarnegara diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.
APK dan APM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

No.	Jenjang Pendidikan	APK*	APM*
1	SD	107,85	93,64
2	SMP	99,42	71,52
3	SMA	60,6	39,53

Sumber : *Kabupaten Banjarnegara dalam Angka Tahun 2015

⁶ BPS, BAPPENAS, UNDP, *Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*, 2004.

⁷ *Banjarnegara dalam Angka Tahun 2015*, Banjarnegara : BPS Banjarnegara, 2015, h. 61.

⁸ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, *Radar Banyumas*, 30 April 2016.

Permasalahan gender dalam bidang kesehatan, antara lain tercermin dari masalah Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu 116,6/100.000 KH pada Tahun 2013 yang berarti terus meningkat jika dibandingkan misalnya dengan AKI Tahun 2011 yaitu 74,29/100.000 KH. Menurut data dari Dinas Kesehatan Banjarnegara, AKI di Banjarnegara saat ini masih yang tertinggi di Jawa Tengah. Sejalan dengan masalah kesehatan tersebut, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara juga memprihatinkan. Dalam hal ini angka kemiskinan di Banjarnegara lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah dan nasional. Menurut keterangan dari Wakil Bupati Banjarnegara, pada kurun waktu Tahun 2011-2015 angka kemiskinan di Banjarnegara hanya turun 0,96% dari 18,71%. Pada Tahun 2015, angka kemiskinan Banjarnegara adalah 17,77%. Padahal rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah adalah 13% dan angka rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10%.⁹

Salah satu indikator penyebab tingginya angka kemiskinan adalah sedikitnya lapangan pekerjaan di Banjarnegara. Dalam hal ini permasalahan gender dapat diidentifikasi dari banyaknya perempuan pencari kerja yang belum terserap dalam sektor pekerjaan. Pada Tahun 2014, data BPS Banjarnegara mencatat terdapat sejumlah 9.662 orang perempuan sebagai pencari kerja. Dari jumlah tersebut, yang sudah ditempatkan hanya sejumlah 2.994 orang atau 30,9%. Adapun jumlah perempuan yang menjadi buruh migran dengan tujuan Singapura, Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, Korea dan Taiwan pada Tahun 2014 tercatat sejumlah 516 orang, sedangkan laki-laki yang bekerja menjadi buruh hanya 65 orang.¹⁰

Selanjutnya permasalahan gender dalam bidang sosial, terlihat dari cukup banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut keterangan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Tercatat sepanjang Tahun 2015, terdapat 64 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 46 kasus kekerasan terhadap

⁹“Angka Kemiskinan Masih Tinggi,” dalam *www.suaramerdeka.com*, 4 Maret 2016 diakses tanggal 12 Juni 2016.

¹⁰ *Banjarnegara dalam Angka Tahun 2015*, Banjarnegara : BPS Banjarnegara, 2015, h. 76.

perempuan dan anak.¹¹ Di bidang politik, sejak diberlakukannya ketentuan afirmasi kuota 30% perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2004, sebenarnya angka keterwakilan politik perempuan di DPRD Banjarnegara secara pelan-pelan meningkat. Namun peningkatan tersebut belum menggembirakan karena hanya berkisar 4%-5% sampai penyelenggaraan pemilu terakhir, yaitu Pemilu 2014. Pada Pemilu 2004, keterwakilan politik perempuan di DPRD Banjarnegara sebanyak 4 orang dari 45 anggota DPRD atau 8,8%. Adapun pada Pemilu 2009, keterwakilan politik perempuan sebanyak 7 orang dari 50 anggota DPRD atau 14%, sedangkan pada Pemilu 2014 jumlah anggota legislatif perempuan naik menjadi 8 orang dari 45 anggota DPRD atau 17,7%. Meskipun naik, namun persentase perempuan yang menjadi anggota dewan tersebut masih belum mencapai minimal kuota yaitu 30% perempuan di dewan sesuai amanat UU Pemilu.¹²

Pendeskripsian isu dan permasalahan gender dalam pembangunan Kabupaten Banjarnegara tentu saja tidak cukup lengkap untuk menggambarkan seluruh permasalahan dan kesenjangan gender yang ada. Namun demikian, jika mempelajari disparitas antara HDI dan GDI Banjarnegara, dengan disertai beberapa data empirik dalam berbagai bidang seperti yang dijabarkan di atas, data tersebut secara faktual memperlihatkan bahwa sampai saat ini permasalahan kesenjangan gender dalam pembangunan di Kabupaten Banjarnegara masih kurang tertangani dengan baik. Namun demikian, Pemkab Banjarnegara sudah menunjukkan komitmennya dengan melahirkan berbagai kebijakan yang mengintegrasikan isu gender didalamnya. Untuk itu uraian di bawah ini akan mendeskripsikan dinamika pengembangan kebijakan gender di Kabupaten Banjarnegara, disertai dengan tinjauan analisis yang mendukung.

¹¹“Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, dalam www.suaramerdeka.com, 19 Januari 2016, diakses 4 Maret 2016.

¹² *Rekapitulasi Pemilu Legislatif Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004, 2009, 2014*, Banjarnegara : KPU Banjarnegara, Tahun 2004, 2009, 2014.

C. Analisis Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender Kabupaten Banjarnegara

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia ditandai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai ketetapan yang mengatur bahwa perencanaan dan penganggaran daerah harus bersifat responsif gender mulai dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, maupun RKP Daerah serta Rencana Kerja (Renja) SKPD. Di samping itu, dalam perencanaan penganggaran daerah yang meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) harus mencakup alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas permasalahan dan kesenjangan gender di masing-masing kabupaten.

Idealnya ketika kabupaten sudah memiliki mekanisme dan pengalokasian anggaran yang sesuai dengan persoalan gender di masing-masing daerah, setidaknya indeks GDI sebagai indikator capaian pemberdayaan gender akan mendekati capaian HDI. Selain itu, capaian pembangunan kualitas manusia yang ditunjukkan oleh capaian HDI juga akan meningkat. Kenyataannya, sampai saat ini Kabupaten Banjarnegara masih mengalami pembangunan manusia dan permasalahan gender yang cukup signifikan. Adanya kesenjangan gender memperlihatkan bahwa strategi pengintegrasian isu gender dalam kebijakan pembangunan daerah belum terimplementasi ke dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah. Kondisi demikian dapat disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya atau kelembagaan terhadap strategi pengarusutamaan gender dalam program pembangunan daerah.

Selanjutnya kita mencoba memberikan analisis pada salah satu kebijakan daerah yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran gender. Dalam hal ini Pemkab Banjarnegara sebenarnya sudah menunjukkan *political will* untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui program kegiatan pembangunan. Hal tersebut antara lain tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 yang tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2012-2016. Beberapa poin evaluasi terhadap substansi isu gender dalam target dan capaian diuraikan sebagai berikut :

Pertama; Meskipun belum ada data terpilah gender berkaitan dengan APK dan APM pendidikan dasar dan menengah, namun capaian APK dan APM tentu menyangkut berapa tingkat partisipasi anak usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini kondisi awal Tahun 2011 APK SD; SMP;SMA adalah 97,3; 80,8; 52,4, dan APM SD;SMP;SMA 96,9;78,7; 45,1 dengan target capaian pada Tahun 2014 adalah APK SD; SMP; SMA adalah 98,9; 89,3; 54,7, sedangkan APM SD;SMP;SMA 98,5;87,2;47,4 Adapun dalam catatan BPS Kabupaten Banjarnegara, pada Tahun 2014 APK SD; SMP;SMA yang dijabarkan dalam Tabel 1 di muka menunjukkan bahwa target peningkatan partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah hanya terpenuhi pada angka partisipasi kasar, tapi untuk angka partisipasi murni belum tercapai.

Kedua; Dalam bidang kesehatan, pada kondisi awal Tahun 2011 angka kematian ibu (AKI) adalah 74,9/100.000 KH. Adapun sampai dengan Tahun 2013, angka kematian ibu justru meningkat menjadi 116,6/100.000 KH. Padahal dalam RPJMD Tahun 2011-2016 dinyatakan bahwa target Tahun 2013 untuk menekan AKI hingga menjadi 74/100.000 KH dan 60/100.000 KH pada Tahun 2016. Dalam hal ini sangat diperlukan perhatian serius dari Pemkab Banjarnegara untuk menangani masalah tersebut dengan mengembangkan kerjasama serius dengan masyarakat.

Ketiga; Dalam hal ketenagakerjaan, RPJMD menekankan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan yang terserap dalam dunia kerja sampai 26%. Adapun dalam catatan BPS Banjarnegara tercatat pada Tahun 2014, dari seluruh jumlah perempuan pencari kerja pada tahun tersebut hanya 30,9% yang sudah ditempatkan dalam dunia kerja. Selanjutnya dalam hal kasus kekerasan terhadap perempuan, masalah tersebut juga menjadi perhatian dari RPJMD Tahun 2011-2016. RPJMD menekankan bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat ditangani 100% oleh unit terkait. Namun sampai saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup banyak terjadi,

seperti misalnya pada Tahun 2015 tercatat 64 kasus kekerasan terhadap perempuan sebagaimana disebutkan di muka.

Keempat; RPJMD Tahun 2011-2016 juga menyinggung mengenai keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif daerah. Dalam hal ini dari perempuan anggota dewan sejumlah 14% hasil Pemilu Legislatif 2009, ternyata baru meningkat lebih kurang 3% yaitu 17% sebagai hasil Pemilu Legislatif 2014. Padahal RPJMD Tahun 2011-2016 menargetkan pada Pemilu Legislatif 2014 persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif daerah sudah mencapai 30%.

Selanjutnya menjadi hal yang penting pula untuk mengkaji jumlah penganggaran untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang tercermin dari pembiayaan bidang pemberdayaan perempuan. Hal tersebut mengacu pada hasil penelitian Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index/IGI*) 2014. Dalam hal ini IGI menjelaskan mengenai rendahnya rata-rata anggaran terkait kesejahteraan yang mencakup pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten/kota. Fenomena yang menunjukkan hal itu yaitu tingginya angka kematian ibu, kemiskinan, perdagangan manusia, dan buruh migran. Bahkan anggaran pemberdayaan perempuan di 34 kabupaten/kota di 33 provinsi rata-rata hanya Rp 589,00 per kapita perempuan per bulan. IGI 2014 menilai sinergi empat aspek yaitu pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi, yang mengisyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Gender menjadi salah satu yang digunakan untuk mengukur dan merumuskan hasil evaluasi tata kelola pemerintahan.¹³

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016, Anggaran Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan pada Tahun 2014 adalah Rp 1.095.000.000. Jika data BPS Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir berimbang dengan laki-laki, dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 448. 522 jiwa, maka secara kasar dapat dihitung

¹³ “Pemberdayaan Perempuan Senilai Setengah Satuan Kerupuk,” *Kompas* 6 Oktober 2014.

anggaran pemberdayaan per kapita perempuan 1.095.000.000/448.522 maka rata-rata per kapita perempuan sebesar Rp 2441,00 atau harga satuan dua kerupuk. Tentu saja angka tersebut hanya merupakan estimasi penghitungan kasar terhadap besaran anggaran pemberdayaan perempuan berdasarkan rencana penganggaran dalam RPJMD Tahun 2011-2016 pada poin anggaran Tahun 2014, dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan pada tahun yang sama sesuai data dari BPS Banjarnegara. Kalaupun penghitungan kasar tersebut cukup mendekati angka yang pasti, tentu sangat diperlukan perhatian yang lebih serius dari Pemkab Banjarnegara untuk memberikan alokasi penganggaran pemberdayaan perempuan sesuai dengan jumlah dan kebutuhan kaum perempuan di wilayah tersebut.

Dari seluruh permasalahan yang terkait dengan kesenjangan gender di atas, pada Tahun 2014 telah ditetapkan Perda No.1 tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender. Tentu hal ini menjadi langkah Pemkab Banjarnegara yang sangat tepat mengingat bahwa perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dengan memperhatikan kasus-kasus kesenjangan gender sebagaimana disebutkan di muka. Sesuai dengan Surat Mendagri No. 050/1232/SJ tentang Pelaksanaan PUG, berisikan agar gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia merumuskan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah/Renstra Daerah/Propeda dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan demikian keluarnya Perda No.1 tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender menjadi strategi dari Pemkab Banjarnegara untuk meningkatkan pengintegrasian isu gender dalam pembangunan secara lebih sistematis, terarah dan memperoleh perlindungan hukum yang jelas, sehingga aspek sustainabilitasnya lebih terjamin.

Pada prinsipnya strategi pembangunan responsif gender yang diatur dalam Perda No.1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender mencakup ketentuan untuk menyusun kebijakan daerah berdasarkan analisis gender mengacu pada metode *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Kebijakan daerah yang dimaksudkan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh Bappeda. Dalam hal ini Bappeda juga sekaligus bertindak sebagai *leading sector* untuk mengkoordinasikan SKPD-SKPD terkait dalam menyusun kebijakan daerah berdasarkan analisis gender yang mencakup Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan perencanaan sektoral.

D. Penutup

Capaian pembangunan manusia dan gender idealnya dapat berjalan beriringan. Ketika capaian pembangunan manusia selaras dengan pembangunan gender, hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini pembangunan manusia dan gender di Kabupaten Banjarnegara masih membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal penghitungan statistik, persoalan gender di Kabupaten Banjarnegara tercermin dari capaian HDI dan GDI Banjarnegara di bawah rata-rata HDI dan GDI Jawa Tengah, bahkan nomor tiga dari bawah dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Secara empirik, persoalan gender tercermin dari belum maksimalnya angka partisipasi usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, angka kematian ibu yang tertinggi di Jawa Tengah, rendahnya penyerapan perempuan pencari kerja di dunia kerja, cukup banyaknya perempuan yang menjadi buruh migran dengan berbagai negara tujuan, masih cukupnya banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, serta rendahnya angka keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif daerah. Tentu saja data tersebut belum mencerminkan persoalan dan kesenjangan gender yang sesungguhnya di Kabupaten Banjarnegara, namun setidaknya menjadi catatan empirik bahwa masalah pembangunan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting diselesaikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Terkait dengan kondisi tersebut, sesungguhnya Pemkab Banjarnegara secara tegas sudah mengintegrasikan isu pembangunan gender dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah. Salah satunya dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 yang menekankan isu pembangunan gender dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi serta yang

secara khusus mencakup sektor pemberdayaan perempuan. Selain itu, sebagai lanjutan bentuk komitmen Pemkab Banjarnegara adalah dengan menetapkan Perda No.1 tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender, yang mengatur keharusan kebijakan daerah berbasis analisis gender dalam kerangka analisis GAP. Meskipun sampai sekarang persoalan pembangunan gender belum terselesaikan dengan baik, namun seluruh komitmen dan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Banjarnegara untuk mengatasi kondisi tersebut patut mendapatkan apresiasi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- “Angka Kemiskinan Masih Tinggi,” dalam *www.suaramerdeka.com*, 4 Maret 2016 diakses tanggal 12 Juni 2016.
- Banjarnegara dalam Angka Tahun 2015*, 2015. Banjarnegara : BPS Banjarnegara.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, *Radar Banyumas*, 30 April 2016.
- BPS, BAPPENAS, UNDP, 2004. *Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*.
- “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, dalam *www.suaramerdeka.com*, 19 Januari 2016, diakses 4 Maret 2016.
- Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2013*, 2013. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- “Pemberdayaan Perempuan Senilai Setengah Satuan Kerupuk,” *Kompas* 6 Oktober 2014.
- Perda Kabupaten Banjarnegara No. 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016*, Banjarnegara : Pemkab Banjarnegara, 2012.
- Perda Kabupaten Banjarnegara No.1 tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender*, Banjarnegara : Pemkab Banjarnegara, 2014.
- Rekapitulasi Pemilu Legislatif Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004, 2009, 2014*, Banjarnegara : KPU Banjarnegara.
- UNDP, 1995. *Human Development Report 1995* (New York: Oxford University Press).